

TANTANGAN BERAT KAPOLRI BARU

Tantangan cukup berat berada di pundak Kapolri yang baru. Tantangan itu antara lain, dalam melakukan reformasi birokrasi di internal lembaganya, berkaitan dengan restrukturisasi kelembagaan Polri. Kapolri harus bisa melakukan perbaikan sistem maupun pembenahan personel di tubuh Polri, sekaligus menjadikan lembaga Polri bersih dan transparan.



OLEH AKHLIS SURYAPATI

BELAKANGAN ini Polri berikut lembaganya banyak mendapat sorotan kritis dari masyarakat karena terjadinya sejumlah peristiwa di lembaga penegak hukum tersebut. Seperti adanya perwira tinggi polisi yang terkait kasus hukum, adanya dugaan sejumlah perwira tinggi polisi yang memiliki rekening gendut, serta sejumlah peristiwa lainnya. Belum lagi tantangan di lapangan yang tidak kalah menyita perhatian, terutama dalam menghadapi kasus-kasus korupsi dan terorisme.

Restrukturisasi kelembagaan Polri sebagai bagian dalam reformasi Polri, merupakan langkah membangun organisasi polisi untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan. Dalam hal ini adalah kinerja kepolisian sebagaimana yang diamanatkan undang-undang serta diharapkan oleh masyarakat.

Konsep dari kelembagaan Polri yang baru, disusun dengan mempertimbangkan masalah-masalah internal maupun eksternal dari Polri itu sendiri. Dalam identifikasinya, sejumlah permasalahan Polri

menjadi dasar penyusunan konsep kelembagaan Polri. Permasalahan internal antara lain, bahwa restrukturisasi organisasi merupakan Amanah RBP sesuai UU No. 17/2007 tentang RPJPN dan RPJMN. Selama ini struktur organisasi yang ada belum mendukung sebaran pelayanan publik.

Hal lain adalah, adanya lembaga Pendidikan Polri yang belum terintegrasi dalam satu wadah. Beberapa komponen dalam struktur organisasi Mabes tidak sinkron dengan Satuan Kewilayahan (Bimmas, Binamitra). Strategi Polmas belum terwadahi secara optimal di dalam Struktur Organisasi. Penyebaran Densus 88/AT di Polda dinilai kurang efektif dan efisien.

Masalah internal lainnya adalah, keberadaan fungsi polisi lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang No. 22/2009 belum setara dengan instansi pemerintah pengemban fungsi Kamseltibcar Lantas lainnya. Begitu pun struktur PIKNAS (Pusat Informasi Kriminal Nasional) di bawah Div Telematika tidak sesuai Tupoksinya. Secara umum struktur organisasi Polri dinilai tidak sesuai lagi dengan Grand Strategy Polri 2005–2025 (Structure

Follow Strategy).

Ada juga peran Pusident yang hanya terbatas sebagai bantuan teknis fungsi Reskrim, dan perlunya dikembangkan peran INAFIS (Indonesian Automatic Fingerprint Identification System). Yang juga menjadi latarbelakang penyusunan konsep kelembagaan Polri yang baru, adalah amanah Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terkait dengan pembentukan PPID yang belum terakomodir dalam Struktur Organisasi Polri. Fungsi Binkum, Humas, Perencanaan, dan Pengawasan belum terakomodir secara berjenjang dalam struktur organisasi Polri sampai ke tingkat Polsek. Tata Fungsi Korwas PPNS belum terintegrasi dengan Bareskrim. Kelola Barang Bukti dan Perawatan Tahanan belum terstruktur.

Keberadaan Komisi Polisi Nasional (Kopolnas) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) belum tergambar koordinasinya dengan Polri dalam Struktur Organisasi Polri. Selama ini keberadaan KP3 masih diatur dengan Keputusan MENHANKAM/PANGAB No.: Kep/B/257/1969 tentang Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3). Keberadaan JCLEC belum berada di bawah Lembaga Pendidikan Polri. Keberadaan Pengawas Penyidikan masih dirangkap oleh Penyidik Utama sebagai Pejabat Fungsional. Banyak MoU Polri dengan pihak lain dan program khusus dari pemerintah yang perlu dilaksanakan dan dimonitor dengan baik perkembangannya.

Sementara itu permasalahan eksternal Polri yang diidentifikasi dalam kajian untuk penyusunan konsep restrukturisasi kelembagaan Polri, antara lain adalah besarnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Polri yang semakin tinggi (Reskrim, Lantas, Sentra Pelayanan Kepolisian, Polres

dan Polsek). Sementara itu Kewajiban UU baru terkait dengan peran Polri belum terakomodir dalam struktur organisasi Polri (UU No. 14/2008 ttg KIP, UU No. 22/2009 ttg LLAJ, UU No.25/2009 ttg Pelayanan Publik).

Kejahatan terorisme global merupakan extra ordinary crime, dianggap semakin menjadi ancaman terhadap bangsa dan negara. Pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar berpenghuni perlu ditingkatkan. Meningkatnya aktifitas WNI di beberapa negara tertentu yang memerlukan perlindungan hukum. Permintaan PBB untuk menyiapkan Formed Police Unit (FPU).

tantangan dan tuntutan baru bagi Polri. Dipesankan Presiden, kajian terhadap struktur organisasi Polri perlu penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Arahan dari Presiden itu kemudian berlanjut dengan rumusan bahwa globalisasi terkait dengan pesatnya ilmu pengetahuan teknologi dan informasi, telah menimbulkan berbagai modus kejahatan seperti terorisme, narkoba, cybercrime, transaksi elektronik, yang berdampak pada beban kerja Polri. Untuk mengatasinya, perlu penyesuaian stuktur organisasi Polri. Sementara itu struktur organisasi Polri yang

Lintas disingkat Korlantas sebagai unsur pelaksana tugas pokok bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang sejajar dengan Korps Brigade Mobil disingkat Korbrimob sebagai unsur pelaksana tugas pokok di bidang brigade mobil.

Penguatan peran kepolisian melalui restrukturisasi kelembagaan Polri betapapun harus menjadi bagian dari semangat reformasi Polri yang di dalamnya tetap berpegang pada nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Sebagaimana pernah diingatkan anggota Kopolnas Novel Ali, konsekuensi logis reformasi Polri sejak 1 April 1999, dalam negara hukum modern dan demokratis, terutama



Selain itu, juga adanya tuntutan kemampuan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta penelitian yang semakin tinggi. Perlu kesetaraan dengan Sistem Administrasi Kementerian Negara (UU No. 39/2008). Perlu kesetaraan dengan Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah (UU No. 32/2004). Selama ini kerjasama antar Lembaga Dalam dan Luar Negeri belum sinergis.

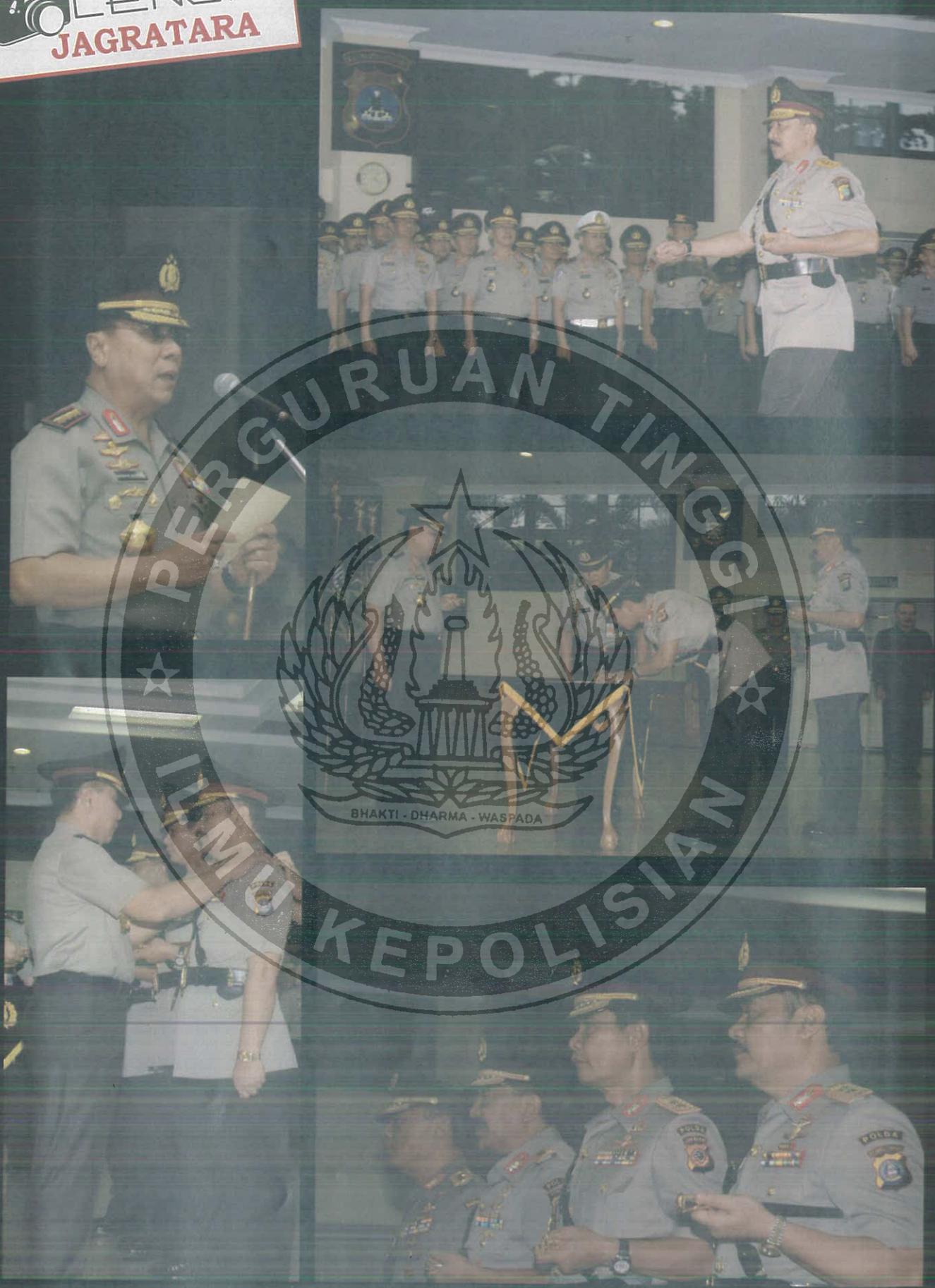
Restrukturisasi organisasi Polri memang sebuah keharusan, sebagaimana dikemukakan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, mengingat perubahan lingkungan strategik menyebabkan munculnya

lalu belum mengakomodasi tugas, fungsi & wewenang Polri yang diamanatkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan cara restrukturisasi organisasi Polri agar dapat menjawab tantangan tugas Polri ke depan.

Konsep kelembagaan Polri yang baru kiranya akan lebih memperkokoh peran polisi keseluruhan serta fungsi-fungsi satuan di dalamnya. Misalnya Densus 88 sebagai unsur pelaksana tugas pokok di bidang penanggulangan kejahatan terorisme yang berada langsung di bawah Kapolri. Demikian juga Korps Lalu

adalah tuntutan agar Polri melekat dengan sipil, antara lain dengan meniadakan ciri-ciri militeristik.

Konsekuensi terdepan akibat reformasi Polri adalah kewajiban Polri sebagai fungsi pemerintahan untuk senantiasa berupaya keras dalam urusan perwujudan kesejahteraan rakyat. Khususnya di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pemberian perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.



ACARA SERTIJAB

Kapolda Jabar dari Irjen Pol Drs. Sutarman kepada Irjen Pol Drs. Suparni Parto, Kapolda Metro Jaya dari Irjen Pol Drs. Timur Pradopo kepada Irjen Pol Drs. Sutarman.



Foto : Fajar/Humas Mabes Polri dan Diki, Kurniawan /Humas PMJ



**LENSA
JAGRATARA**

Perubahan Struktur di Tubuh Polri Juga diwarnai dengan pergantian tugas para anggota Polri, salah satunya acara sertijab yang dilakukan di Aula Bareskrim Polri 12 Oktober 2010 lalu.

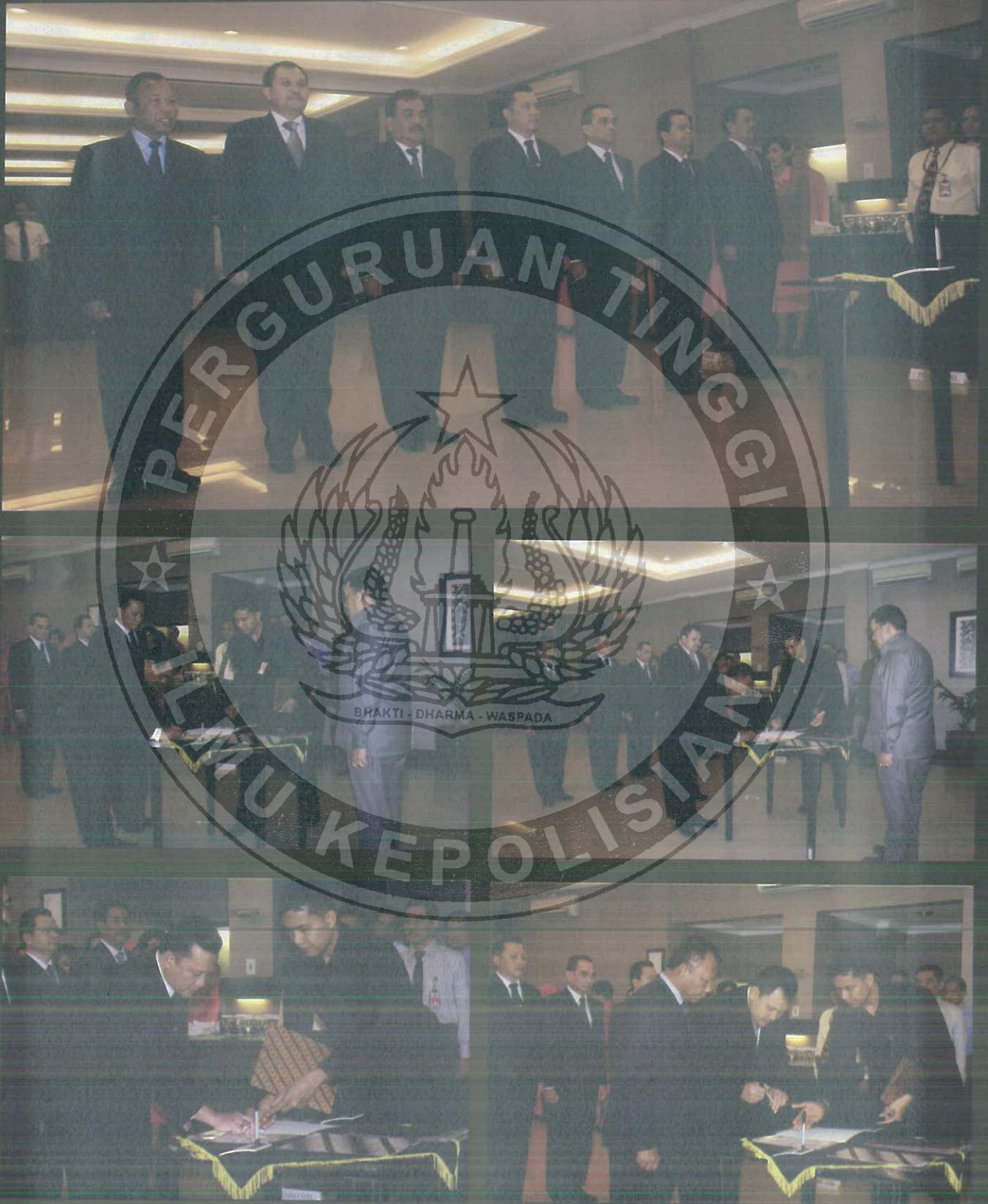




Foto : Eva/Jagratara

POPULER, TAK SELALU MEMBANGGAKAN

Dari Seminar “Penanggulangan Konflik Komunal Di Nusa Tenggara Barat”

Kepopuleran atau menjadi populer belum tentu membanggakan. Inilah cerita tentang Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang populer di mancanegara bukan karena prestasinya melainkan karena kerapnya konflik kekerasan yang terjadi di wilayah Indonesia Barat ini. Cara-cara kekerasan, tiba-tiba saja menjadi jalan keluar bagi mereka yang berkonflik di propinsi ini. Mulai dari bentuk amuk sampai kemudian berkembang menjadi konflik komunal yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh mereka yang berkonflik pada khususnya, tetapi juga masyarakat Indonesia pada umumnya.

ADALAH Prof Ir Sunarpi Phd, Rektor Universitas Mataram, yang mengungkapkan hal itu dalam seminar nasional penanggulangan konflik komunal di NTB, Juni silam. Menurut

Sunarpi, setiap ia melakukan kunjungan ke luar negeri beberapa kawannya selalu bertanya tentang konflik yang terjadi di wilayah NTB yakni konflik Ketare, Lombok Tengah dan Ngali-Renda, Kabupaten Bima. “Pertanyaan-pertanyaan itu adalah fakta

yang sangat merugikan. Karena itu, marilah kita, semua pihak, bersama-sama semua menyatukan persepsi dalam menyelesaikan konflik tersebut,” katanya.

Konflik sosial yang terjadi di NTB, dan juga sejumlah wilayah lainnya di Indonesia, merupakan salah satu persoalan serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini, berbagai konflik sosial yang terjadi di Indonesia telah membawa kerugian yang cukup besar, baik kerugian materiil maupun hilangnya nyawa ratusan bahkan ribuan manusia.

KONFLIK pada dasarnya adalah ciri dinamika masyarakatnya, untuk memperoleh keadaan yang lebih baik, yang terjadinya mulai dari konflik ringan dan tersembunyi



hingga tingkat yang berat dan terbuka. Konflik diartikan sebagai bentuk pertentangan antara satu dengan pihak lainnya. Konflik juga diartikan sebagai perjuangan nilai dan tuntutan atas status, kekuasaan dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai atau melenyapkan lawan. Konflik merupakan proses ke arah upaya memperoleh penghargaan dengan cara menghilangkan dan memperlemah pesaingnya.

Kapolda Nusa Tenggara Barat Brigjen Pol Arief Wachyunadi pun mengakui bahwa Propinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu propinsi di Indonesia dengan tingkat konflik yang cukup tinggi. Konflik yang terjadi pun sangat variatif mulai dari persoalan agama, etnis, suku, pengelolaan sumber daya ekonomi maupun politik.

Peristiwa-peristiwa itu, tandas Arif Wachyunadi, selain membawa kerugian yang tidak sedikit, celakanya juga terekspos secara nasional di berbagai media cetak dan elektronik sehingga terbentuk sebuah opini yang negatif tentang NTB. Bahwa NTB adalah propinsi yang sarat konflik, tidak aman dan tidak kondusif. "Nah ini bila tidak disikapi secara arif dan bijaksana akan menghambat iklim investasi dan ekonomi di NTB karena tidak ada jaminan keamanan," tegasnya.

Arief mengakui bahwa berbagai upaya penyelesaian sebenarnya telah dilaksanakan baik oleh pemerintah daerah, kepolisian maupun pihak-pihak terkait lainnya, namun kebanyakan upaya tersebut lebih terfokus pada penanganan pasca konflik sehingga seringkali akar masalah dari konflik tersebut tidak pernah terselesaikan.

Begitu pula berbagai penelitian pun sudah sering dilakukan namun kajiannya cenderung parsial-parsial baik itu dengan sudut pandang/keilmuan tertentu atau satu wilayah tertentu. Padahal yang diperlukan adalah suatu kajian yang lebih komprehensif dengan sudut pandang atau keilmuan yang berbeda-beda.

Dengan latar belakang itulah maka Polda NTB melakukan



kontrak kerjasama (MOU) dengan Lembaga Penelitian Universitas Mataram untuk melakukan penelitian terhadap daerah-daerah potensi konflik di NTB. Hasil penelitian tersebut diharapkan bisa membantu menemukan solusi terhadap potensi konflik di daerah NTB.

Hasil penelitian itu sendiri kemudian diseminarkan dengan tajuk "Penanggulangan Konflik Komunal Konflik Komunal Di Nusa Tenggara Barat" pada 23 Juni 2010 bertempat di The Santosa Villas and Resort Lombok, Senggigi, Nusa Tenggara Barat. Seminar yang terselenggara atas kerjasama Polda NTB, Iniversitas Unram, Korem 162 Wira Bhakti dan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat ini dihadiri oleh berbagai stakeholder terkait dan menghasilkan sebuah rumusan

berdasarkan pandangan para ahli dari berbagai sudut pandang ilmu.

Arief Wahyunadi mengungkapkan, data di Polda NTB menunjukkan sepanjang tahun 2007 sampai dengan Februari 2010 terjadi 79 kali konflik komunal di Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Lombok Barat berada dalam posisi teratas dengan 24 kali konflik, menyusul Lombok tengah 20 kali, Bima 14 kali, Lombok Timur 9 Kali, Mataram 8 Kali, Sumbawa 3 kali dan Dompu 1 kali. Berbagai konflik komunal yang terjadi tersebut berupa perkelahian antar warga sebanyak 49 kasus dan kekerasan massa berupa pengrusakan sebanyak 30 kasus. *****

TINGGINYA angka kasus konflik yang terjadi di NTB harus menjadi perhatian bersama



dan tak perlu muncul apologi dari kesalahan yang telah terjadi. Naka memandang konflik ini semua pihak harus jujur dan terbuka demi menemukan solusi yang baik.

Demikian pernyataan Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi MA dalam seminar tersebut. Dia menghimbau kepada kearifan lokal --yang pernah menjadi karakter masyarakat NTB --- untuk lebih kritis. "Apakah kearifan lokal itu menganjurkan hidup berdampingan secara damai atau justru malah mengakibatkan konflik?" kata Zainul Majdi dengan nada bertanya.

Tentang penelitian yang sudah dilakukan Unram dan Polda NTB dia berharap dapat memberikan perhatian yang nyata bagi pengembangan masyarakat. Gubernur menganggap, langkah konflik komunal sangat perlu, sebab konflik komunal tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. Karena ini merupakan konflik sosial yang disebabkan oleh banyak faktor. "Jadi jangan teori saja," tandasnya.

Sementara Prof Din Syamsudin yang tampil sebagai pembicara dalam seminar tersebut mengatakan bahwa ia prihatin dengan konflik-konflik yang terjadi di NTB. Selaku putra Indonesia kelahiran NTB sangat

prihatin dan merasa sedih. Namun dirinya bersyukur, semua pihak memberikan perhatian penanggulangan melalui penelitian tersebut terutama Polda NTB sebagai pemrakarsa yang telah menempuh langkah-langkah yang sistematis.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini menambahkan bahwa penanganan konflik komunal di wilayah NTB membutuhkan pendekatan khas karena pemicu konfliknya juga dilatari persoalan khusus. Tokoh nasional yang berasal dari NTB itu sependapat dengan pandangan Gubernur NTB TGH.M Zainul Majdi yang berharap hasil penelitian konflik komunal oleh peneliti Unram bersama Polda NTB tidak hanya teori saja melainkan harus bisa memberikan hasil nyata.

Menurut Din, strategi penanganan konflik komunal itu penting, apalagi berbagai konflik komunal di NTB yang sulit diredam juga erat kaitannya dengan pola penanganan tidak komprehensif. Pasalnya, sangat mungkin pihak-pihak yang berkewajiban menuntaskan konflik komunal itu tidak tahu cara penanganannya atau harus memulainya dari mana. Din Samsyudin menambahkan bahwa watak bangsa Indonesia

saat ini sedang tergerus oleh zaman sehingga diperlukan instrumen untuk mengatur irama masyarakat.

Masyarakat Indonesia pada umumnya membutuhkan relaksasi sosial dan pemerintah perlu untuk memfasilitasinya. Din juga menilai, pihak yang tinggal bersama masyarakat di daerah konflik komunal itu yang lebih mengetahui cara penanganan konfliknya. Namun penanganan konflik seperti itu harus dimulai dari penelusuran penyebab konflik kemudian dicarikan solusinya secara komprehensif.

Sementara itu tawaran penyelesaian lain disampaikan DR.Zulkieflimansyah, Anggota Komisi VII DPR RI. Ia mengatakan bahwa penyelesaian konflik komunal di NTB perlu melalui pendekatan persuasif. Berkaca dari konflik berkepanjangan antar warga Lingkungan Petemon dengan Karang Genteng, Kelurahan Pagutan, Ampenan Mataram. Kini kehidupan warga dua lingkungan tersebut sudah damai dan tenang.

Sebelumnya penyelesaian konflik Petemon dan Karang Genteng seperti mengurai benang kusut. Namun setelah dilakukan pendekatan-pendekatan selain persuasif, pelaku-pelakunya sudah ditangkap dan dihukum maksimal, konflik di Petemon dan Karang Genteng terentaskan.

Artinya, tambah Zulkieflimansyah penyelesaian konflik komunal di NTB perlu dilakukan secara komprehensif dengan berbagai pendekatan. Misalnya pendekatan budaya, agama dan pendekatan hukum dengan memberikan hukuman maksimal bagi siapapun yang terlibat konflik. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, mentrasmigrasikan seluruh warga yang konflik ke tempat yang berbeda. Mungkin pendekatan tersebut tak menuntaskan persoalan, tapi paling tidak bias jadi salah satu pilihan penyelesaian, tentu dengan kalkulasi dan pertimbangan-pertimbangan yang matang.



IKATAN KELUARGA BESAR JAGRATARA

Sekretariat : Komplek Pori Pengadegan Blok O Nomor 24 Jakarta Selatan 12770 Telfax : 021-7991954

MENGUCAPKAN

Selamat Ulang Tahun.

KEPADA

- BRIGJEN POL DRS. MUHAMMAD RUM MURKAL, PALEMBANG, 03-09-1959
KOMBES POL DRS. SLAMET RAHARDJO, SH, MM, KLATEN, 04-09-1960
KOMBES POL DRS. WAHYU ADI, JAKARTA, 08-09-1961
KOMBES POL DRS. ANAS YUSUF, BREBES, 11-09-1961
KOMBES POL DRS. FIRMAN HUTABARAT, JAKARTA, 12-09-1959
KOMBES POL DRS. TRI WIDAKDO, BOYOLALI, 13-09-1961
KOMBES POL DRS. MARTONO, NGANJUK, 14-09-1959
BRIGJEN POL DRS. BEKTI SUHARTONO, BANDUNG, 15-09-1958
KOMBES POL DRS. BUDI SUSILO, BOJONEGORO, 15-09-1958
KOMBES POL DRS. SETYO PRIHADI, MAGETAN, 16-09-1960
BRIGJEN POL DRS. RONNY FRENGKI SOMPIE, SH, MH, SURABAYA, 17-09-1961
KOMBES POL DRS. SAFARUDDIN, KAMPIRI, 18-09-1960
KOMBES POL DRS. ACHMADI, SH, MAP SRAGEN, 20-09-1960
BRIGJEN POL DRS. SISTERSINS MAMADOA, SANGIR, 22-09-1960
KOMBES POL DRS. MUHAMMAD HASAN AMROZI, GRESIK, 01-10-1961
KOMBES POL DRS. ACHMAD LUMUMBA, MALANG, 05-10-1960
IRJEN POL DRS. DJOKO SUSILO, SH, MSI, MADIUN, 07-10-1960
KOMBES POL DRS. ONENG SUBROTO, YOGYAKARTA, 07-10-1961
KOMBES POL DRS. SOEKAMSO WARGO SANTOSO, TEMANGGUNG, 08-10-1959
KOMBES POL DRS. HERU SULISTIANTO, JEMBER, 09-10-1958
KOMBES POL DRS. SOBRI EFFENDY SURYA, PALEMBANG, 10-10-1959
KOMBES POL DRS. MUHAMMAD SYAHRIL, SUNAGI LIAT, 10-10-1959
KOMBES POL DRS. IMAM BUDI SUPENO, BOJONEGORO, 13-10-1960
KOMBES POL DRS. BAMBANG USADI, BANDUNG, 19-10-1959
KOMBES POL DRS. FAISAL ABDUL NASIR, MEDAN, 23-10-1961

*Semoga Panjang Umur
& Sukses Selalu*

Normlessness, Sang Pemicu....

PENYEBAB kerap terjadinya konflik horizontal di sejumlah wilayah di NTB, salah satunya adalah perubahan pola sikap, atau kondisi anomi atau normlessness masyarakat saat ini. Tingkat anomi ini berbeda antara masyarakat satu dengan yang lainnya dan ketika terjadi terkadang sudah sampai pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan.

KONDISI itulah yang menjadi pemicu pada konflik di Ketare Lombok Tengah dan Ngali-Renda

Kabupaten Bima, sebagai hasil penelitian yang dibacakan M Natsir, SH, Ketua tim riset Polda NTB dan Universitas Mataram, dalam jumpa pers menjelang seminar dua hari sebelumnya. Pada kondisi tersebut masyarakat tak lagi menemukan tokoh yang bisa dijadikan panutan, sementara norma-norma yang selama ini ada umumnya tak lagi ditaati dan ditakuti. Sementara kearifan lokal yang dulunya ada seperti musyawarah dan gotong royong pun sudah mulai ditinggalkan. "Masyarakat juga lebih cenderung menyelesaikan masalahnya sendiri yaitu dengan kekerasan," tandas Natsir.

Kondisi tersebut masih diperparah dengan adanya praktek-praktek politik dan sistem ketatanegaraan tak sehat yang saat itu terjadi di tengah-tengah masyarakat. Penyebab konflik

selanjutnya yakni adanya suatu soliditas mekanis masyarakat yang menyebabkan adanya solidaritas kolektif yang sempit sehingga mempermudah pecahnya konflik komunal di tengah-tengah masyarakat.

Penyebab konflik berikutnya adalah penanganan pemicu (strigger) yang terlambat diantisipasi oleh aparat kepolisian. Keterlambatan tersebut dikarenakan terpaku oleh mekanisme normative, yaitu tidak adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara aparat pemerintah desa dan TNI (Babinsa).

Konflik juga terjadi karena pengaruh faktor-faktor lainnya baik factor sosial, ekonomi, budaya maupun sejarah yang kesemuanya saling berkaitan. Penyebabnya karena lemahnya tatanan sosial yang ada di tengah masyarakat atau bisa





juga faktor keturunan. Pemerintah cenderung hanya bertindak bak seorang pemadam kebakaran namun tak menyelesaikan akar masalah dari konflik tersebut. "Bahkan di beberapa wilayah cenderung ada proses pembiaran yang dilakukan pemerintah daerah karena masalah politik," terang Natsir seraya menggarisbawahi satu hal, bahwa di beberapa daerah terjadi hubungan yang cenderung tidak harmonis antara Pemda, kepolisian dan TNI karena tidak adanya suatu sistem penanganan konflik yang integral dan terpadu.

Dan yang paling memprihatinkan, ada semacam sinyalemen keberpihakan oknum aparat keamanan terhadap salah satu kelompok yang bertikai. Terbukti hingga saat ini, adanya oknum aparat keamanan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Kemudian lambannya penanganan konflik oleh aparat keamanan dan pemerintah daerah menyebabkan cepatnya konflik meluas. Jika ada laporan konflik dari masyarakat cenderung lamban ditangani akibat polisi selalu berstandar pada KUHAP, dimana, polisi dinilai masih merasa takut terjerat pelanggaran HAM.

Sebenarnya kata Natsir, konflik

komunal di NTB dipicu oleh hal sepele. Yakni perkelahian anak muda yang menimbulkan solidaritas kolektif. Dimana, masyarakat bukannya langsung melaporkan kepada petugas jika terjadi konflik, melainkan menyampaikannya kepada pihak keluarga. Akibatnya, solidaritas yang sempit itu akan memudahkan pecahnya konflik di masyarakat.

Temuan lainnya, Natsir melihat penanganan konflik di NTB selama ini ibarat pemadam kebakaran yang hanya memadamkan api namun tidak menyelesaikan akar masalahnya. Bahkan, ada indikasi konflik dijadikan pemeliharaan yang tentunya hal tersebut jelas-jelas melanggar HAM. Penanganan konflik lanjutnya, tidak energik dan terkesan saling menunggu. Hal itu akibat tidak adanya sistem penanganan konflik yang integral dan terpadu.

Sementara, Rektor Unram, Prof DR HSunarpi Ph.D menilai, kondisi masing-masing daerah, baik kota maupun kabupaten di NTB sangat unik. Pasalnya, banyak masyarakat di suatu daerah memiliki persepsi yang berbeda terhadap sebuah nilai. Ada sebuah nilai yang berlaku di suatu daerah namun tidak diakui alias tidak dipakai di tempat lain. Terkadang nilai atau norma yang berlaku di

suatu daerah bertentangan dengan norma hukum dan agama. Untuk merubah hal tersebut tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Untuk menangani fenomena perbedaan persepsi nilai di dalam komunitas masyarakat tertentu dikatakan Sunarpi, pihak-pihak terkait harus terjun langsung ketengah masyarakat dan mengajak masyarakat berbicara dari hati kehati. Karena itu perlu dilakukan penelitian yang akan direkomendasikan untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi.

Sunarpi mengatakan, semua hasil penelitian tim riset nanti diharapkan bisa sampai kepada masyarakat melalui peran serta semua pihak terutama media. Hasil riset ini lanjutnya, akan direkomendasikan sebagai sarana untuk mencari solusi. Konflik komunal di NTB dikatakan Sunarpi, gaungnya bukan hanya di kalangan nasional bahkan sudah menembus internasional.

Kemudian hal terpenting lainnya adalah faktor keamanan. Proses pembangunan daerah jika tidak ada jaminan keamanan yang memadai, rasanya sulit sekali terwujud.
